

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG ADAT *SEANGKONAN*
DALAM PERNIKAHAN BEDA SUKU**

(Studi Pada Masyarakat Adat Lampung Pubian di Desa Gedong
Tataan Kabupaten Pesawaran)

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas Dan Memenuhi Syarat-
Syarat

Guna Memperoleh Gelar Sarjana S.1
Dalam Ilmu Syari'ah



Oleh

Binta Duratun Nafisa
NPM: 1621010102

Program Studi: HKI (*Ahwal Syakhsiyyah*)

FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
1443 H / 2021 M

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG ADAT *SEANGKONAN*
DALAM PERNIKAHAN BEDA SUKU**
(Studi Pada Masyarakat Adat Lampung Pubian di Desa
Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran)

Skripsi

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas Dan Memenuhi
Syarat- Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana S.1
Dalam Ilmu Syari'ah

Oleh
Binta Duratun Nafisa
NPM: 1621010102

Program Studi: HKI (*Ahwal Syakhsiyyah*)

Pembimbing I : Dr. Susiadi AS., M. Sos.I.
Pembimbing II : Hasanuddin Muhammad, M.H

FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
1443 H / 2021 M

ABSTRAK

Angkon/seangkonan dilaksanakan apabila terdapat salah satu masyarakat adat Lampung Pubian yang ingin menikah dengan orang selain suku Lampung Pubian. Orang yang berasal dari lain suku Lampung Pubian tersebut harus terlebih dahulu dijadikan sebagai keluarga pada masyarakat adat Lampung Pubian. Walaupun *angkon/seangkonan* ini tidak terdapat dalam al-Qur'an maupun hadis, namun masyarakat tetap menggunakannya sebagai syarat dilangsungkannya pernikahan. Adat yang tetap eksis ditengah pesatnya arus modernisasi ini menarik penulis untuk melakukan penelitian lebih dalam tentang bagaimana Islam memandang adat *seangkonan* ini. Oleh sebab itu penulis memilih judul "Tinjauan Hukum Islam Tentang Adat *Seangkonan* Dalam Pernikahan Beda Suku (Studi Pada Masyarakat Adat Lampung Pubian di Desa Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran)" dengan rumusan masalah: 1. Bagaimana praktik adat *seangkonan* dalam pernikahan beda suku pada masyarakat Lampung Pubian. 2. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap adat *seangkonan* dalam pernikahan beda suku pada masyarakat Lampung Pubian. Tujuan dari penelitian ini adalah 1. Untuk mengetahui apa yang menjadi sebab adanya adat *seangkonan* dalam adat Lampung Pubian di Desa Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran. 2. Untuk mengetahui bagaimana pandangan hukum Islam terhadap adat *seangkonan* dalam adat Lampung Pubian.

Jenis penelitian dalam skripsi ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Sifat penelitian ini adalah deskriptif analisis. Sumber data yang diperoleh dari penelitian ini yaitu data primer yang diperoleh langsung dari sumbernya, baik melalui *observasi*, *interview*, dan dokumentasi serta dilengkapi juga dengan data sekunder. Kemudian data-data tersebut diolah dengan cara *editing* dan *sistemazing*. Setelah semua data terkumpul, penulis melakukan analisa data secara kualitatif untuk menghasilkan data deskriptif dengan metode berfikir induktif.

Berdasarkan dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa, 1. Seangkonan pada pernikahan beda suku ialah tradisi yang dilaksanakan apabila terdapat salah satu masyarakat adat Lampung Pubian yang ingin menikah dengan orang selain suku Lampung Pubian. Orang yang berasal dari lain suku Lampung Pubian tersebut harus terlebih dahulu dijadikan bagian dari keluarga masyarakat adat

Lampung Pubian. Dalam adat *seangkonan* diawali dengan silaturahmi dengan calon orang tua angkat, selanjutnya dilangsungkan *ukhawan bidang suku* untuk memberikan informasi kepada penimbang adat bahwa seorang tersebut telah mengangkon anak. Setelah itu adanya pencatatan yang dikukan oleh ketua adat. Ada sanksi sosial yang harus ditanggung seorang keluarga jika tidak melangsungkan adat *seangkonan*, diantaranya ialah tidak diperbolehkan melaksanakan pernikahan, serta tidak akan di undang dalam segala bentuk acara adat. Namun karena mengedepankan rasa kemanusiaan, maka sanksi sosial tersebut kini ditiadakan di Desa Gedong Tataan. 2. Islam tidak melarang adanya pengangkatan seorang untuk dijadikan anak. Selama tujuan pengangkatan tersebut tidak bertentangan dengan syariat Islam, maka diperbolehkan. Dalam adat *seangkonan* tidak akan mengganggu syarat dan rukun pernikahan dalam Islam. Sehingga adat *seangkonan* tetap boleh dilaksanakan.

Kata Kunci: Islam, Pernikahan, *Seangkonan*



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat: Jl. Let. Kol. H Endo Suratmin Sukarame Bandar Lampung Telp. (0721)780887

SURAT PERNYATAAN

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Binta Duratun Nafisa

NPM : 1621010102

Program Studi : Ahwal Al-Syakhsiyyah

Fakultas : Syari'ah

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang berjudul **"TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG ADAT SEANGKONAN DALAM PERNIKAHAN BEDA SUKU (Studi Pada Masyarakat Adat Lampung Pubian di Desa Tataan Kabupaten Pesawaran)"** adalah benar karya saya. Apabila terdapat kesalahan dan kekeliruan sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Bandar Lampung, 09 September 2021

Yang Menyatakan



Binta Duratun Nafisa
NPM: 1621010102



KEMENTERIAN AGAMA
UIN RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH

Alamat: Jl. Let. Kol. H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung Telp. (0721)780887

PERSETUJUAN

Tim pembimbing, setelah mengoreksi dan memberikan masukan-masukan secukupnya, maka skripsi saudara.

Nama : BINTA DURATUN NAFISA
NPM : 1621010102
Program Studi : Ahwal Al-Syakhsiyyah
Fakultas : Syari'ah
Judul Skripsi : TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG ADAT
SEANGKONAN DALAM PERNIKAHAN BEDA
SUKU (Studi Pada Masyarakat Adat Lampung Pubian
di Desa Tataan Kabupaten Pesawaran)

MENYETUJUI

Untuk dimunaqosyahkan dan dipertahankan dalam sidang Munaqosyah Fakultas
Syari'ah UIN Raden Intan Lampung

Bandar Lampung, 09 September 2021

Pembimbing I,

Dr. Susiadi AS., M. Sos.I
NIP.195808171993031002

Pembimbing II,

Hasanuddin Muhammad, M.H
NIP.199111172019031018

Ketua Jurusan Ahwal Al-Syakhsiyyah,

R. Rohmat, S.Ag., M.HI
NIP. 197409202003121003



**KEMENTERIAN AGAMA
UIN RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat: Jl. Let. Kol. H. Endro Suramin Sukarame Bandar Lampung Telp. (0721) 780887

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul : **Tinjauan Hukum Islam Tentang Adat Seangknan Dalam Pernikahan Beda Suku (Studi Pada Masyarakat Adat Lampung Pubian di Desa Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran)**. Disusun oleh: **BINTA DURATUN NAFISA, NPM 1621010102**, Program Studi: **HKI (Ahwal Syakhsyiyah)**, telah diujikan dalam sidang Munaqosyah Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung pada Hari Tanggal : **24 September 2021**

DEWAN PENGUJI

Ketua : **Marwin, S.H., M.H.**

Sekretaris : **Ahmad Sukandi, M.H.I.**

Penguji I : **Dr.Hj. Zuhrami, M.H.**

Penguji II : **Dr. Susiadi AS., M.Sos.I**

Penguji III : **Hasanuddin Muhammad., M.H.**

**Dekan
Fakultas Syariah**

Dr. H. Khairuddin, M.H.

NPM 16210221993031002

MOTTO

مَا رَأَاهُمُ الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا، فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ هَسَنٌ، وَمَا رَأَاهُمُ الْمُسْلِمُونَ سَيِّئًا،

فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ سَيِّئٌ

“Apa yang dipandang oleh orang-orang Islam baik, maka baik pula disisi Allah swt., dan apa yang dianggap orang-orang Islam buruk maka buruk pulalah di sisi Allah swt.”

(H.R.Ahmad)

PERSEMBAHAN

Bismillahirrahmanirraahim

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat serta hidayah-Nya. Shalawat teriring salam tak lupa kita sanjung agungkan kepada baginda kita Nabi Muhammad SAW. Sebuah karya sederhana namun butuh perjuangan, dengan bangga penulis mempersembahkan skripsi ini kepada:

Kedua orang tuaku, papa tercinta H. Gufron Haryono dan mama tercinta Hj. Nur Hidayati yang selalu sabar, tulus, ikhlas mendidik, membesarkan, menyayangi, mendukung, membiayai serta mendo'akan setiap langkah selama menempuh pendidikan, hingga dapat menyelesaikan studi di UIN Raden Intan Lampung.

Eyang tersayang, eyang akung H. Imam Syafi'i dan eyang uti Hj. Yamini yang selalu menjadi penyemangat dan tak henti memberikan doa kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan studi di Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung.

Ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya penulis ucapkan kepada Abang Feriza, ukhti Vivi, mas Rizal, ukhti Devi, mas Izul, ukhti Lala, dan adek Mirza yang telah memberikan dukungannya, terutama Iyay wabi yang telah mensponsori skripsi ini.

Tak lupa teman seperjuanganku, Silvia, Aisyah, Erfina, Dynis, Dessy, Sitta, Indah, Sasqia, Agung, Reno, Wibi, Kak Nicho, dan semua teman AS B terimakasih sudah berbagi kisah.

RIWAYAT HIDUP

Binta Duratun Nafisa dilahirkan di Desa Gedung Karya Jitu, Kecamatan Rawa Jitu Selatan, Kabupaten Tulang Bawang pada 09 Juni 1998, anak keempat dari enam bersaudara hasil buah cinta Bapak H. Ghufron Haryono dan Hj. Ibu Nur Hidayati. Nafisa memulai pendidikan Taman Kanak-kanak (TK) di TK Mamba'ul Ulum, Rawajitu Selatan dan selesai pada tahun 2004. Pendidikan dasar ia tempuh di Madrasah Ibtidaiyah (MI) Mamba'ul Ulum Rawajitu Selatan dan selesai pada tahun 2010. Selanjutnya ia menempuh pendidikan menengah pertama pada Madrasah Tsyanawiyah (MTS) Diniyyah Putri Pesawaran, Lampung dan selesai pada tahun 2013. Sedangkan untuk sekolah menengah atas ia tempuh di Madrasah Aliyah Negeri (MAN) Tambak Beras Jombang, Jawa Timur dan selesai pada tahun 2016. Pada tahun 2016, ia tercatat sebagai mahasiswi fakultas syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung dan dinyatakan lulus pada tahun 2021.

BandarLampung, 09 September 2021
Yang Menyatakan

Binta Duratun Nafisa
NPM: 1621010102

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat serta hidayahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir yaitu skripsi ini. Shalawat beserta salam kita sanjung agungkan kepada junjungan kita Nabi yang Agung, nabiullah Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman jahiliyyah menuju zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan.

Adapun judul skripsi ini adalah **“Tinjauan Hukum Islam Tentang Adat *Seangkonan* Dalam Pernikahan Beda Suku (Studi Pada Masyarakat Adat Lampung Pubian di Desa Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran)”**. Skripsi ini disusun untuk melengkapi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung.

Terselesaikannya penyusunan skripsi ini tak luput dari bantuan dan dukungan berbagai pihak. Maka penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang terlibat dalam penyusunan skripsi ini. Secara khusus saya ucapkan terimakasih kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. H. Moh. Mukri, M.Ag., selaku Rektor UIN Raden Intan Lampung.
2. Bapak Dr. H. Khairuddin, M.H., selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung.
3. Bapak H. Rohmat, S.Ag., M.H.I. dan Bapak Dr. Abdul Qodir Zaelani, S.H.I., M.A. selaku Ketua Jurusan dan Sekretaris Jurusan HKI (*Ahwal Syakhsiyyah*) Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung.
4. Bapak Dr. Susiadi AS., M. Sos.I selaku Pembimbing I dan Bapak Hasanuddin Muhammad, M.H. selaku Pembimbing II, serta tim penguji yang telah banyak memberikan kritik dan saran.
5. Jajaran perangkat Desa Gedong Tataan serta masyarakat Desa Gedong Tataan khususnya pihak yang telah berkenan memberikan keterangan pada saat penulis melakukan penelitian.
6. Pimpinan dan Karyawan perpustakaan serta seluruh civitas akademika Fakultas Syariah

7. Orang tuaku, Papa H. Gufron Haryono, Mama Hj. Nur Hidayati serta kakak kandungku Tivivi, Mas Rizal, Mas Ijul, yang tidak hentinya memberikan segalanya hingga akhirnya skripsi ini terselesaikan.

Semoga Allah SWT memberikan Hidayah Taufiq-Nya sebagai balasan atas bantuan dan bimbingan yang telah mereka berikan, Aamiin Yarobbal a'lam.

Bandar Lampung, 09 September 2021

Binta Duratun Nafisa

NPM: 1621010102

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
PERNYATAAN ORISIONALITAS	iv
PERSETUJUAN.....	v
PENGESAHAN.....	vi
MOTTO	vii
PERSEMBAHAN.....	viii
RIWAYAT HIDUP	ix
KATA PENGANTAR.....	x
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR TABEL.....	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv

BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul	1
B. Latar Belakang Masalah	2
C. Identifikasi dan Batasan Masalah	7
D. Fokus Penelitian dan Subfokus Penelitian	8
E. Rumusan Masalah	8
F. Tujuan Penelitian.....	9
G. Manfaat Penelitian.....	9
H. Kajian Penelitian Terdahulu	10
I. Metode Penelitian.....	12
J. Sistematika Penulisan	20

BAB II LANDASAN TEORI

A. Perkawinan Menurut Hukum Islam	23
B. Perkawinan Menurut Hukum Adat	26
1. Sistem dan Asas-asas Perkawinan Adat	27
2. Putusnya Perkawinan Adat.....	29
3. Larangan Perkawinan Adat	30
4. Macam-Macam dan Bentuk Perkawinan Adat	31

C. Pengertian ‘ <i>Urf</i>	28
1. Landasan Hukum ‘ <i>Urf</i>	36
2. Klasifikasi ‘ <i>Urf</i>	38
3. Kedudukan ‘ <i>Urf</i>	39

BAB III LAPORAN HASIL PENELITIAN

A. Biografi Desa Gedong Tataan.....	41
1. Sejarah Desa	41
2. Visi, Misi dan Tujuan Desa Gedong Tataan.....	44
3. Keadaan Masyarakat Desa Gedong Tataan	45
B. Praktik Seangkonan di Desa Gedong Tataan	47
C. Tujuan Adat Seangkonan di Desa Gedong Tataan.....	61

BAB IV ANALISA DATA

A. Praktik Adat Seangkonan Pada Masyarakat Adat Desa Gedong Tataan	63
B. Pandangan Hukum Islam Terhadap Tradisi Seangkonan Pada Adat Lampung Pubian	66

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	68
B. Rekomendasi	70

DAFTAR RUJUKAN

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1. Tabel Keterangan SDM	40
2. Tabel Batas Wilayah Desa	41
3. Tabel Data Penduduk Berdasarkan Pendidikan.....	41
4. Tabel Penduduk Berdasarkan Tingkat Perekonomian	43
5. Tabel Data Penduduk Berdasarkan Agama	44

DAFTAR LAMPIRAN

1. Lampiran 1 : Foto Dokumentasi Wawancara
2. Lampiran 2 : Surat Kesbangpol Pesawaran
3. Lampiran 3 : Surat Keterangan Penelitian
4. Lampiran 4 : Surat Keterangan Wawancara

BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Sebagai kerangka awal guna mendapatkan gambaran yang jelas dan memudahkan dalam memahami skripsi, maka perlu adanya uraian terhadap penegasan arti dan makna dari beberapa istilah yang terkait dengan tujuan di buatnya skripsi ini. Penegasan tersebut di harapkan menghindari terjadi kesalahpahaman terhadap pemaknaan judul dari beberapa istilah yang telah di gunakan dan meminimalisir terjadinya multi tafsir terhadap judul. Selain itu, langkah ini merupakan pokok penekanan terhadap pokok permasalahan yang akan di bahas.

Adapun skripsi yang berjudul **“Tinjauan Hukum Islam Tentang Adat *Seangkonan* Dalam Pernikahan Beda Suku (Studi Pada Masyarakat Adat Lampung Pubian di Desa Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran)”**. Dengan uraian sebagai berikut:

1. Tinjauan Hukum Islam adalah sekumpulan ketetapan hukum kemaslahatan mengenai perbuatan hamba yang terkandung pada sumber Al-Quran dan Sunnah baik ketetapan langsung maupun tidak langsung yang di lihat dari kaca mata agama Islam.¹
2. Tradisi adalah adat kebiasaan turun-temurun (dari nenek moyang) yang masih dijalankan dalam masyarakat.²

¹ Shalahin, Bunyana *Kaidah Hukum Islam* (Yogyakarta: Kreasi Total Media, 2016), 11.

² Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka.2010), 239.

3. *Seangkonan* adalah tradisi menjadikan orang lain sebagai bagian keluarga, baik itu untuk dijadikan kakak/adik angkat maupun dijadikan sebagai anak angkat.³
4. Pernikahan menurut KBBI adalah hal (perbuatan) menikah.⁴
5. Suku menurut KBBI adalah golongan bangsa sebagai bagian dari bangsa yang besar.⁵

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa “Tinjauan Hukum Islam Tentang Tradisi *Seangkonan* Dalam Pernikahan Beda Suku” adalah upaya pengkajian secara mendalam tentang bagaimana pandangan Islam terhadap budaya atau *Al-urf* yang hidup dan berkembang dalam masyarakat dan bagaimana pandangan masyarakat setempat menyikapi fenomena tersebut.

B. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan suatu akad yang mengandung kebolehan melakukan hubungan seksual dengan memakai lafaz nikah atau *tazwij*.⁶ Perkawinan juga merupakan suatu akad yang menyebabkan kebolehan bergaul antara laki-laki dan juga perempuan dan saling menolong diantara keduanya serta menentukan batas hak dan kewajiban diantaranya.⁷ Wujud *sunatullah* yang berlaku menyeluruh bagi semua makhluk di

³ Nabahan, “Pernikahan Beda Suku Lampung Pubian”, *Wawancara*, Januari 10, 2021.

⁴ Kamus Bahasa Indonesia Pusat bahasa Edisi keempat (Jakarta : Pt Gramedia Pustaka Utama, 2011), 1350.

⁵ *Ibid*, 890.

⁶ Hakim, Rahmat, *Hukum Perkawinan Islam*, (Bandung: Pustaka setia, 2009), 12.

⁷ *Ibid*, 13.

alam semesta adalah terciptanya makhluk dengan jodoh dan pasangannya yang serasi. Demikian pula dalam undang-undang perkawinan disebutkan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita dengan suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (Rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa.⁸

Tradisi merupakan kebiasaan suatu masyarakat yang memiliki makna dan nilai yang terus dijaga dan dilakukan secara turun-menurun. Kata Tradisi memiliki makna yaitu: Pertama, adat kebiasaan turun-menurun (dari nenek moyang) yang masih dijalankan dalam masyarakat; dan Kedua, penilaian atau anggapan bahwa cara-cara yang telah ada merupakan yang paling baik dan benar.⁹ Tradisi sebagai wujud sistem sosial yang bersifat konkret dan dapat diamati berupa aktivitas manusia yang saling berinteraksi dan selalu mengikuti pola-pola tertentu berdasarkan adat tata kelakuan yang ada dalam masyarakat.¹⁰

Islam sebagai agama rahmat, kehadirannya bertujuan untuk menciptakan kebaikan bagi seluruh umat manusia. Wahyu yang disampaikan kepada Rasulullah SAW dalam bentuk kitab bernama Al-Qur'an menjadi jawaban bagi setiap persoalan bagi kehidupan masyarakat. Disamping itu, terdapat juga Sunah atau ajaran Rasulullah SAW yang turut dijadikan pedoman dalam menjalankan kehidupan.

⁸ Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 1 ayat (1)

⁹ Kamus Besar Bahasa Indonesia Online, <https://kbbi.web.id/tradisi> di akses pada tanggal 12 Januari 2021

¹⁰ Pusat Data dan Statistik Pendidikan dan Kebudayaan. Analisis Kearifan Lokal Ditinjau Dari Keragaman Budaya Tahun 2016 (Jakarta: Kemdikbud RI, 2016), 12.

Setiap aturan syariat yang diwahyukan hadir untuk menjawab setiap fenomena sosial yang ada pada saat itu. Fenomena sosial ini banyak macamnya, mulai dari yang berkaitan dengan ibadah kepada Allah SWT sampai dengan hal yang berkaitan dengan hubungan sesama manusia.

Nash atau aturan hukum yang ada tentunya tidak bisa diimplementasikan secara langsung dalam kehidupan bermasyarakat. Aturan yang ada harus disesuaikan dengan konteks realita yang ada. Maka perlu adanya proses penentuan hukum dalam bentuk *Ijma* para ulama untuk menyesuaikan antara teks dan konteks.

Indonesia sebagai negara *pluralisme* menyatu dalam beragam perbedaan, mulai dari keyakinan, suku, dan ras. Perbedaan suku mengakibatkan terjadinya perbedaan dalam budaya setiap daerah atau kelompok masyarakat Indonesia. Setiap daerah mempunyai ciri khas tersendiri terutama dalam hal pernikahan.

Lampung menjadi salah satu daerah yang kaya akan adat istiadat. Bahkan daerah yang dijuluki “Sai Bumi Khua Jurai” ini terdapat dua kelompok masyarakat adat, adat sai batin dan pepadun. Dua kelompok masyarakat adat ini terdapat kebiasaan atau adat istiadat yang berbeda. Dalam kelompok masyarakat pepadun terbagi lagi menjadi beberapa kelompok masyarakat. Salah satunya adalah masyarakat Lampung pubian. Masyarakat Lampung pubian banyak tinggal dan menetap di sebagian daerah Kabupaten Pesawaran khususnya di Desa Gedong Tataan. Dalam

adat istiadat kelompok ini terdapat sebuah tradisi budaya yang tetap eksis hingga saat ini, tradisi tersebut bernama *seangkonan*.

Seangkonan secara istilah dapat diartikan sebagai upaya mempererat silaturahmi antar individu dengan individu. Tradisi ini biasanya dipraktekkan dalam sebuah acara pernikahan. Berdasarkan keterangan yang disampaikan salah satu penyimbang adat Desa Gedong Tataan, Bapak Nabahan dengan gelar Suntan Pemimpin menjelaskan bahwa, “setiap seorang bersuku Lampung pubian jika ingin menikah dengan orang selain suku Lampung pubian maka sang calon pengantin dari luar suku tersebut akan terlebih dahulu diangkat menjadi anak oleh pihak lain yang bersuku Lampung pubian. Setelah itu barulah kedua mempelai diperbolehkan melangsungkan pernikahan, jika tidak, namun tetap melangsungkan pernikahan, maka akan dikenakan sanksi sosial dan juga denda berupa pembayaran sejumlah uang”.¹¹ Terdapat lima pasangan pengantin yang telah melakukan *seangkonan* sebelum pengantin tersebut melangsungkan pernikahan.

Dalam tradisi *seangkonan*, ketika pengantin tersebut sudah terdaftar secara adat sebagai bagian dari suku Lampung Pubian maka keduanya akan mendapatkan gelar yang diberikan oleh orang tua angkat dan akan melekat sampai kapanpun. Namun jika tidak melaksanakan prosesi adat *seangkonan* maka akan berdampak kepada sang pengantin, diantaranya:

¹¹Nabahan, “Pernikahan Beda Suku Lampung Pubian”, *Wawancara*, Januari 10. 2021.

1. Tidak mendapatkan pengakuan dari masyarakat sekitar (dikucilkan);
2. Tidak akan mendapatkan *adok*/gelar adat;
3. Pihak orang tua, adik atau kakak pengantin, dilarang melaksanakan pernikahan sebelum pengantin sebelumnya melakukan prosesi *seangkanon*

Selain itu, orang tua angkat berperan selayaknya orang tua kandung yang bertanggungjawab secara adat terhadap anak yang di angkat olehnya. Hal ini tidak sesuai dengan Al-Qur'an Surah Al-Ahzab ayat 4 yang berbunyi

مَا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِّنْ قَلْبَيْنِ فِيْ جَوْفِهِۦ وَمَا جَعَلَ أَزْوَاجَكُمْ إِلَيْيَ
تُظْهِرُونَ مِنْهُنَّ أُمَّهَاتِكُمْ وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ذَٰلِكُمْ قَوْلُكُمْ
بِأَفْوَاهِكُمْ وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ

"Allah tidak menjadikan bagi seseorang dua hati dalam rongganya; Dan, dia tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri); yang demikian itu hanyalah perkataanmu di mulutmu saja. Dan, Allah mengatakan yang sebenarnya dan Dia menunjukkan jalan yang benar". (Q.S Al-Ahzab [33] : 4)

Ayat diatas menjelaskan bahwa tidak diperbolehkan menjadikan anak angkat sebagaimana anak kandung sendiri, karena orang tua angkat tidak memiliki tanggungjawab

menafkahi sepenuhnya kebutuhan anak angkatnya. Sedangkan dalam tradisi *seangkonan* masyarakat adat Lampung pubian, sang orang tua angkat bertanggungjawab penuh terhadap anak angkatnya secara adat. Hal ini kemudian menimbulkan sebuah pertanyaan, apakah jika bertanggungjawab secara adat sama halnya dengan Q.S Al-Ahzab ayat 4 dan.

Untuk menjawab pertanyaan tersebut, maka penulis akan melakukan sebuah penelitian ilmiah untuk mencari jawaban bagaimana Islam melihat fenomena tersebut. Maka judul penelitian ini adalah Tinjauan Hukum Islam Tentang Tradisi *Seangkonan* Dalam Pernikahan Beda Suku Studi Pada Tradisi Masyarakat Adat Lampung Pubian. Harapannya peneltian ini akan menghasilkan sebuah refrensi bagi penulis ataupun masyarakat pada umumnya.

C. Identifikasi dan Batasan Masalah

1. Identifikasi masalah pada penelitian ini ialah sebagai berikut:
 - a. Belum ditemukan adanya penelitan ilmiah yang membahas tradisi *seangkonan* masyarakat adat Lampung Pubian di Desa Gedong Tataan
 - b. Minimnya pengetahuan masyarakat Desa Gedong Tataan tentang tradisi *seangkonan* menurut pandangan hukum Islam
 - c. Minimnya literatur yang menjelaskan praktik tradisi *seangkonan* di Desa Gedong Tataan
2. Batasan Masalah

Agar penelitian ini dapat dilakukan lebih fokus, sempurna serta mendalam, maka permasalahan penelitian yang

diangkat perlu dibatasi variabelnya. Oleh sebab itu, penelitian ini dibatasi hanya yang berkaitan dengan praktik tradisi *seangkonan* dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap tradisi *seangkonan*. Kedua hal tersebut dipilih karena hasil penelitian akan menjadi sumber referensi bagi masyarakat Desa Gedong Tataan khususnya.

D. Fokus Penelitian dan Subfokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah, maka fokus penelitian ini adalah “**Tinjauan Hukum Islam Tentang Tradisi *Seangkonan* Dalam Pernikahan Beda Suku**”. Fokus Penelitian tersebut kemudian akan diurai menjadi beberapa sub fokus yang akan penulis teliti :

1. Tinjauan Hukum Islam Tentang adat *Seangkonan*
2. Praktik adat *seangkonan* di masyarakat adat Desa Gedong Tataan
3. Pandangan hukum Islam terhadap tradisi *seangkonan* pada adat Lampung Pubian.

E. Rumusan Masalah

1. Bagaimana praktik adat *seangkonan* dalam pernikahan beda suku pada masyarakat Lampung Pubian?
2. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap adat *seangkonan* dalam pernikahan beda suku pada masyarakat Lampung Pubian?

F. Tujuan Penelitian

1. Untuk Mengetahui apa yang menjadi sebab adanya adat *seangkonan* dalam adat Lampung Pubian di Desa Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran
2. Untuk Mengetahui Bagaimana Pandangan Hukum Islam Terhadap adat *seangkonan* dalam adat Lampung Pubian.

G. Manfaat Penelitian

- a. Secara teoritis, bagi masyarakat pada umumnya penelitian ini di harapkan akan memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai bagaimana Tinjauan Hukum Islam Tentang Tradisi *Seangkonan* Dalam Pernikahan Beda Suku Studi Pada Tradisi Masyarakat Adat Lampung Pubian di Desa Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran mampu menjadikan atau membuat kepastian hukum bagi masyarakat dalam kosentrasi hukum Islam yang di harapkan mampu menambah khazanah keilmuan serta pemikiran ke islamanan pada umumnya di kalangan masyarakat, Penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman mengenai konsep *Al-Urf* sesuai dengan Syariat Islam yang berdasarkan Al- Quran dan hadist, Selain itu juga di harapkan mampu menjadi barometer untuk penelitian selanjutnya sehingga proses pengkajian akan terus berlangsung dan di laksanakan guna untuk memperoleh hasil yang memuaskan dan maksimal bagi ke ilmunan Indonesia secara luas.

- b. Secara praktis, penelitian ini di maksudkan untuk memenuhi syarat tugas akhir guna memperoleh gelar S.H. pada UIN Raden Intan Lampung yang InsyaAllah akan bermanfaat secara luas untuk masyarakat.

H. Kajian Penelitian Terdahulu

Kajian penelitian terdahulu yang relevan merupakan ulasan peneliti terhadap bahan pustaka dan hasil-hasil penelitian yang sudah dilakukan orang lain dan relevean dengan tema dan topik penelitian yang akan dilakukan. Berdasarkan judul diatas, maka penulis menemukan beberapa penelitian yang relevan dengan penelitian yang akan dilakukan, antara lain:

Fadli Khairuzzadhi, (Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2015), dengan skripsinya yang berjudul *Pengangkonan Dalam Pernikahan Beda Suku Pada Masyarakat Lampung Pepadun (Studi di Kecamatan Padang Ratu, Kabupaten Lampung Tengah)*. Kesimpulan penelitian ini ialah makna upacara pengangkonan dalam perkwaninan pada masyarakat Lampung Pepadun adalah suatu usaha untuk mempertahankan tali kekerabatan adat yang ada tidak terputus walaupun menikah dengan orang yang berlainan suku, karena ngangkon merupakan ketentuan yang harus dipenuhi bagi mereka yang menikah dengan suku lain guna mengikutin tata tertib adat dan mendapatkan legalitas perkawinan yang dilakukan.¹² Pada penelitian ini yang diteliti adalah makna dari tradisi pengangkonan/*seangkonan*.

¹² Fadli Khairuzzadhi, "*Pengangkonan Dalam Pernikahan Beda Suku Pada Masyarakat Lampung Pepadun*" (Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2015), 62.

Sedangkan pada penelitian saat ini, penulis berusaha mengungkap bagaimana praktik tradisi *seangkonan* serta bagaimana tinjauan hukum Islam mengenai tradisi *seangkonan*.

Indah Putriana, S.H, (Universitas Diponegoro, 2008), dengan tesis berjudul Pelaksanaan Pengangkatan (Pengangkatan Anak) Dalam Perkawinan Beda Suku Pada Masyarakat Lampung Pepadun di Desa Negeri Sakti Kabupaten Pesawaran. Kesimpulan pada penelitian ini *pertama*, pelaksanaan upacara ngangkon pada masyarakat adat Lampung Pepadun di Desa Negeri Sakti berjalan sesuai dengan ketentuan adat, yaitu mulai dari pengangkatan bapak angkat sampai dengan pembayaran uno (daw adat/uang adat). Namun apabila tidak atau belum ada tersedianya uno sebagai penentu terlaksananya ngangkon maka upacara ngangkon tersebut dapat terhambat bahkan dibatalkan. *Kedua*, kedudukan anak yang diangkon dalam masyarakat adat Lampung Pepadun adalah kedudukan menantu dapat diakui dalam adat dan sah menjadi warga adat Lampung, sehingga orang Lampung yang menikah dengan orang berlainan suku tidak hilang statusnya dalam adat sebagai warga adat Lampung.¹³ Secara garis besar penelitian yang akan diteliti sama dengan pembahasan pada tesis diatas, namun yang menjadi pembeda ialah pada penelitian yang akan penulis teliti akan membahas bagaimana tinjauan hukum Islam mengenai tradisi *seangkonan*.

Inten Puteri Resmi Zaini, Hermi Yanzi, Yunisca Nurmalisa (Jurnal Kultur Demokrasi), dengan judul Peranan Tokoh Adat

¹³ Indah Putriana, “*Pelaksanaan Pengangkatan (Pengangkatan Anak) Dalam Perkawinan Beda Suku Pada Masyarakat Lampung Pepadun di Desa Negeri Sakti Kabupaten Pesawaran*” (Tesis, Universitas Diponegoro, 2008), 115.

Terhadap Pelestarian Adat Pengangkongan Pada Masyarakat Lampung Pepadun. Kesimpulan penelitian ini ialah tetap diadakannya kegiatan rutin yang dilakukan para tokoh adat untuk membahas tentang adat istiadat masyarakat Lampung. Selain itu, kesadaran masyarakat untuk tetap melestarikan adat budaya Lampung khususnya pengangkongan (pengangkatan anak) dengan cara menerapkan dalam melaksanakan adat pengangkongan ini walaupun zaman sudah berubah.¹⁴ Pada jurnal ini membahas peran tokoh adat, namun sama sekali tidak menyinggung bagaimana tinjauan hukum Islam tentang tradisi *seangkongan*.

Berdasarkan kajian penelitian yang telah ada, penelitian dengan objek pernikahan dalam masyarakat ada sudah pernah diteliti, hanya saja dengan lokasi dan kultur adat istiadat yang berbeda tentunya. Namun penelitian yang membahas tentang tradisi *seangkongan* pada pernikahan beda suku pada belum pernah dibahas sebelumnya, maka penelitian Tinjauan Hukum Islam Tentang Tradisi *Seangkongan* Dalam Pernikahan Beda Suku dirasa penulis memenuhi unsur kebaruan, sehingga penelitian ini bisa dipertanggungjawabkan.

I. Metode Penelitian

Metode Penelitian adalah suatu kegiatan ilmiah yang dilakukan secara bertahap dimulai dengan penentuan topik, pengumpulan data dan menganalisis data, sehingga nantinya diperoleh suatu pemahaman dan pengertian atas topik, gejala,

¹⁴ Inten Puteri, dkk “Peranan Tokoh Adat Terhadap Pelestarian Adat Pengangkongan Pada Masyarakat Lampung Pepadun” (Jurnal Kultur Demokrasi).

atau isu tertentu.¹⁵ Dalam hal ini penulis memperoleh data dari penelitian lapangan dan pustaka tentang Konsep Hukum yang sesuai dengan *Syariat* Islam dengan objek penelitian di Desa Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran.

1. Jenis Penelitian dan Sifat Penelitian

a. Jenis Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Alasan dalam mengkaji bagaimana pandangan hukum Islam tentang tradisi *seangkonan* dalam pernikahan beda suku pada adat Lampung Pubian, hal ini lah yang melatar belakangi peneliti ingin meneliti bagaimana kepastian pandangan hukum Islam menyikapi tentang fenomena adat Istiadat tersebut. dengan konsep hukum Islam ini untuk melahirkan perspektif dimana akan muncul suatu masalah yang terfokus pada bagaimana pandangan hukum Islam itu sendiri.¹⁶

Penelitian yang di gunakan ini termasuk penelitian lapangan (*field research*) yang pada dasarnya merupakan metode untuk menemukan secara khusus dan realitas tentang apa yang terjadi dalam ruang lingkup konsep bagaimana pandangan hukum Islam tentang tentang tradisi *seangkonan* dalam pernikahan beda suku pada adat Lampung Pubian dan menuangkanya dalam proses

¹⁵J.R Raco, *Metode Penelitian Kualitatif: Jenis, Karakteristik dan Keunggulanya*. (Jakarta: Grasido, 2008), 2-3.

¹⁶Sugiono, *Cara Mudah Menyusun Skripsi, Tesis Dan Disertasi*, (Bandung: Alfabeta, 2014), 18.

atau gejala sosial. Dalam hal ini langsung mengamati masyarakat pada Desa Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran.

b. Sifat Penelitian

Data yang diperoleh sebagai data lama, dianalisis secara bertahap dan berlapis secara deskriptif analisis kualitatif, yaitu suatu metode Dalam meneliti status sekelompok manusia, objek, suatu kondisi, suatu sistem pemikiran, ataupun suatau kelas peristiwa pada masa sekarang.¹⁷

2. Sumber Data

Sumber Data adalah obyek dari mana data diperoleh.¹⁸ Fokus penelitian ini lebih ke pada persoalan bagaimana pandangan hukum Islam menyikapai fenomena tradisi *seangkonan* yang menjadi permasalahan pada masa kini apakah hal ini sesuai dengan ketentuan dan syariat Islam. Oleh karena itu sumber data yang di gunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung oleh responden atau obyek yang penulis teliti.¹⁹ Dalam hal ini data primer yang diperoleh dari pihak-pihak yang dijadikan rujukan untuk memperoleh data melalui

¹⁷ Zuriah, Nurul, *Metode Penelitian Social Dan Pendidikan Teori Dan Aplikasi*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2007), 47.

¹⁸ Febriani, Nufian S, *Teori dan Praktis Riset Komunikasi Pemasaran Terpadu*, (Jakarta: Tim Ub Press, 2018), 49.

¹⁹ *Ibid*, 105.

wawancara. Diantaranya, Ketua Adat, dua orang Tokoh Penyimbang Adat yang telah melangsungkan adat seangkonan, Tokoh Agama, serta dua orang Tokoh Pemuda di Desa Gedong Tataan.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang lebih dulu di kumpulkan dan dilaporkan oleh seseorang atau instansi yang terkait diluar dari penelitian itu sendiri, walaupun yang di kumpulkan ini sesungguhnya adalah data yang asli. Data sekunder di peroleh dari buku-buku fiqh yang terdapat dalam buku ushul fiqh dan hukum keluarga yang tentunya mempunyai relevansi dengan permasalahan yang di kaji dalam permasalahan ini.²⁰

3. Metode Pengumpulan Data

Metode Pengumpulan data adalah proses pengadaan data untuk keperluan penelitian.²¹ Metode pengumpulan data yang di gunakan dalam usaha menghimpun data untuk penelitian ini, di gunakan beberapa metode yaitu :

a. Observasi

Observasi adalah cara atau teknik pengumpulan data dengan cara melakukan pengamatan dan pencatatan serta sistematik terhadap gejala atau fenomena yang ada pada objek penelitian.²²

²⁰ *Ibid*, 105

²¹ W. Gulo, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Gafindo, 2002), 155.

²² *Ibid*, 234.

b. Interview

Interview adalah metode pengumpulan data dengan cara tanya jawab kepada narasumber langsung yang di kerjakan dengan cara sistematis dan berlandaskan pada masalah, tujuan, dan hipotesis penelitian.²³ Pada praktiknya penulis menyiapkan berbagai pertanyaan kemudian dikemas menjadi daftar pertanyaan yang di ajukan secara langsung kepada para Narasumber. Teknik pengumpulan data ini mendasarkan diri pada laporan tentang diri sendiri atau *Self-report* atau setidaknya pada pengetahuan dan keyakinan pribadi.

c. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal- hal atau variable berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, agenda dan sebagainya.²⁴

4. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan.²⁵ Adat *seangkonan* yang telah berlangsung turun temurun tidak

²³Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2012), h.243

²⁴Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Reneka Cipta, 2013), 188..

²⁵ Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2012), 243.

dibarengi dengan upaya inventarisir data yang menghasilkan jumlah pasti orang yang telah melaksanakan adat *seangkonan*. Maka poplasi dari penelitian ini adalah segala hal yang berkaitan dengan tradisi *seangkonan*, yaitu terdapat 3 populasi yang terdiri dari pimpinan tokoh adat, tokoh agama, dan tokoh pemuda yang melaksanakan tradisi *seangkonan*. Populasi yang dipilih merupakan representatif seluruh pihak yang terlibat dalam penelitian ini.

b. Sampel

Sampel adalah bagian dari populasi yang diambil melalui cara-cara tertentu yang juga memiliki karakteristik tertentu, jelas dan lengkap yang dianggap bisa mewakili populasi. Teknik yang digunakan dalam pengambilan sampel penelitian ini adalah *purposive sampling*. *Purposive sampling* yaitu teknik penentuan sampel dengan pertimbangan atau kriteria-kriteria tertentu. Sampel dari penelitian ini diambil dari beberapa populasi dan digunakan sebagai objek penelitian. Adapun sampel dalam penelitian ini adalah :

- 1) Ketua adat dan 2 penimbang adat yang telah melaksanakan adat *seangkonan*.
- 2) Satu tokoh agama Desa Gedong Tataan.
- 3) 2 tokoh pemuda yang melaksanakan adat *seangkonan*.

Alasannya adalah karena 3 orang tokoh adat, 1 orang tokoh agama, serta 2 orang tokoh pemuda yang melaksanakan adat *seangkonan*, sudah cukup menjadi

representatif atas pihak-pihak yang terlibat didalam penelitian ini. Jadi, sampel pada penelitian ini berjumlah 6 sampel.

5. Pengolahan Data

Data yang sudah terkumpul kemudian diolah, pengolahan data dilakukan dengan editing, yaitu pengecekan atau pengkoreksian data yang telah di kumpulkan, karena kemungkinan data yang masuk (*raw data*) atau terkumpul itu tidak logis dan meragukan.²⁶ Pengecekan dan pengkoreksian ini juga bertujuan untuk mengoreksi apakah data yang terkumpul sudah cukup lengkap, dan sudah sesuai atau relevan dengan masalah yang akan di bahas dengan judul Tinjauan Hukum Islam Tentang Tradisi *Seangkonan*.

Metode analisis data yang di gunakan di penelitian ini di sesuaikan dengan kajian penelitian, yaitu Tinjauan Hukum Islam Tentang Tradisi *Seangkonan* pada pernikahan beda suku yang akan di kaji dengan menggunakan Metode Kualitatif. Maksudnya adalah bahwa analisis ini bertujuan untuk mengetahui bagaimanakah Tinjauan Hukum Islam atau Pandangan Hukum Islam menyikapi Tradisi *Seangkonan* pada pernikahan beda suku ini apakah sesuai dengan koridor *Syariat* Islam. Tujuannya dapat dilihat dari sudut perspektif hukum Islam itu sendiri yaitu agar nantinya penelitian ini mampu memberikan kontribusi keilmuan yang nyata dalam pemahaman penelitian tersebut.

²⁶Susiadi AS, *Metodologi penelitian* (Bandar Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbit LP2M Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2015), 23.

Setelah data-data dikumpulkan dengan lengkap, maka tahapan berikutnya adalah mengelola dan menganalisis data yang terdiri dari beberapa langkah-langkah. Adapun langkah-langkah yang digunakan adalah sebagai berikut:

a. *Editing*

Memeriksa kembali semua data yang diperoleh dengan memilih dan menyeleksi data tersebut dari berbagai segi yang meliputi kesesuaian dan keselarasan satu dengan yang lainnya, keaslian, kejelasan serta relevansinya dengan permasalahan.²⁷ Meneliti kembali catatan-catatan dan berkas-berkas data yang diperoleh setelah pengumpulan data baik interview dan observasi untuk mengetahui apakah catatan-catatan tersebut sudah cukup baik dan dapat segera disiapkan untuk keperluan proses berikutnya.

b. *Sistemazing* (Sistematika Data)

Yaitu menempatkan data menurut kerangka sistematika bahasan berdasarkan urutan masalah. Berdasarkan pokok bahasan dan sub pokok bahasan yang diidentifikasi dari rumusan masalah.

6. Metode Analisis

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini dikaji dengan menggunakan analisis secara kualitatif yaitu berupa suatu prosedur yang menghasilkan data deskriptif, dan merupakan gambaran penjelasan secara logis dan sistematis.

²⁷ Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metode Penelitian* (Jakarta: Bumi Aksara, 1997), 153.

Metode berfikir yang digunakan secara induktif, dari suatu jawaban permasalahan pokok yang diangkat dalam penelitian.

Metode analisis data yang di gunakan di penelitian ini di sesuaikan dengan kajian penelitian, yaitu Tinjauan Hukum Islam Tentang Tradisi Seangkonan pada pernikahan beda suku yang akan di kaji dengan menggunakan Metode Kualitatif. Maksudnya adalah analisis ini bertujuan untuk mengetahui bagaimanakah Tinjauan Hukum Islam atau Pandangan Hukum Islam menyikapi Tradisi Seangkonan pada pernikahan beda suku ini apakah sesuai dengan koridor *Syariat* Islam. Tujuanya dapat dilihat dari sudut perspektif hukum Islam itu sendiri yaitu agar nantinya penelitian ini mampu memberikan kontribusi keilmuan yang nyata dalam pemahaman penelitian tersebut.

J. Sistematika Penulisan

Sistematika dalam pembuatan skripsi ini agar lebih jelas dan tertata dengan rapih maka disusun dalam berbagai bab dari bab satu hingga bab lima.

Pada bab ke satu, dimana bab ini merupakan awal dari pembukaan pokok permasalahan yang akan dibahas. Dengan dituliskannya latar belakang, pembahasan dan perumusan masalah, manfaat, metode penulisan dari pembahasan ini sebagai pengantar untuk pembaca agar mengetahui hal apa yang akan dibahas dalam skripsi ini.

Pada bab ke dua, disajikan data-data hasil penelitian yang dikumpulkan secara akurat, berupa gambaran umum tentang

pengertian perkawinan, syarat dan rukun perkawinan, perkawinan dalam masyarakat Lampung Pubian, serta pengertian pengangkatan anak.

Pada bab ke tiga, disajikan gambaran lokasi penelitian di Desa Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran, proses pelaksanaan *seangkonanan*, dan kedudukan anak yang telah *diangkon*.

Pada bab ke empat, berisi analisa tentang pengangkonan, menurut pandangan tokoh adat Lampung Pubian dan presfektif hukum Islam.

Pada bab ke lima, merupakan kesimpulan dari tradisi *seangkonan* dalam pernikahan beda suku masyarakat Lampung Pubian, serta saran dari penulis tentang hasil penelitian yang telah dilakukan.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Perkawinan Menurut Hukum Islam

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.²⁸ Pernikahan berasal dari kata nikah (حَكَوْ) yang menurut bahasa artinya mengumpulkan, saling memasukan dan digunakan untuk arti bersetubuh (*wathi*), kata “nikah” sendiri sering dipergunakan untuk arti persetubuhan (*coitus*), juga untuk arti akad nikah.²⁹

Kata nakaha/nikah banyak terdapat dalam Al-Qur'an, seperti dalam surat An-Nisa' ayat 22:

وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ۚ إِنَّهُ كَانَ
فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا^٣

“Janganlah kamu menikahi wanita-wanita yang telah dinikahi oleh ayahmu, kecuali (kejadian pada masa) yang telah lampau. Sesungguhnya (perbuatan) itu sangat keji dan dibenci (oleh Allah) dan seburuk-buruk jalan (yang ditempuh).” (Q.S. An-Nisa' [4]: 22)

Perkawinan menurut *syara'* yaitu akad yang ditetapkan *syara'* untuk membolehkan bersenang-senang antara laki-laki

²⁸ Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974.

²⁹ Wahab Al-Zuhaili, *Al-fiqih Al-Islami wa Adillatuh*, Cet. III, (Bairut: Dār al-fikr 1989), 29.

dengan perempuan dan menghalalkan bersenang-senangnya perempuan dengan laki-laki.³⁰

Yahya Zakariya Al-Anshary mendefinisikan nikah menurut istilah *syara'* ialah akad yang mengandung ketentuan hukum kebolehan hubungan seksual dengan lafaz nikah atau dengan kata-kata yang semakna dengannya.³¹

Pengertian-pengertian di atas tampaknya dibuat hanya melihat dari satu segi saja yaitu kebolehan hukum dalam hubungan antara seorang laki-laki dan seorang wanita yang semula dilarang menjadi dibolehkan. Padahal setiap perbuatan hukum itu mempunyai tujuan dan akibat ataupun pengaruhnya. Hal-hal inilah yang menjadikan perhatian manusia pada umumnya dalam kehidupan sehari-hari, seperti terjadinya perceraian, kurang adanya keseimbangan antara suami istri, sehingga memerlukan penegasan arti perkawinan, bukan saja dari segi kebolehan hubungan seksual tetapi juga dari segi tujuan dan akibat hukumnya.

Dalam kaitan ini, Muhammad Abu Ishrah memberikan definisi yang lebih luas, yang juga dikutip oleh Zakiah Daradjat yaitu akad yang akan memberikan faedah hukum kebolehan mengadakan hubungan keluarga (suami istri) antara pria dan wanita dan mengadakan tolong-menolong dan memberi batas hak bagi pemiliknya serta pemenuhan kewajiban bagi masing-masing. Dari pengertian ini pernikahan mengandung aspek

³⁰ Abdur Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Prenada Media Grup 2003), 8.

³¹ Abu Yahya Zakariya Al-Anshary, *Fath Al-Wahab*, Juz 2, (Singapura: Sulaiman Mar'y, t.t.), 30.

akibat hukum, melangsungkan pernikahan ialah saling mendapat hak dan kewajiban serta bertujuan mengadakan hubungan pergaulan yang dilandasi tolong-menolong. Karena pernikahan termasuk pelaksanaan agama, maka di dalamnya terkandung adanya tujuan atau maksud mengharap keridhaan Allah SWT.³²

Dalam kompilasi hukum Islam, pengertian perkawinan dan tujuannya dinyatakan dalam pasal 2 dan 3 sebagai berikut:

Pasal 2, “Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang kuat atau *mistawan ghalizhan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah”.

Pasal 3, “Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawadah, dan rahmah”.³³

Dalam hukum Islam, hukum perkawinan ada lima yang semuanya dikembalikan pada calon suami istri, yang ada kalanya hukum menjadi:³⁴

- a) Mubaz (jaiz), sebagaimana asal hukumnya;
- b) Sunnah, bagi orang yang sudah mampu baik secara *dhohir* maupun secara batin (cukup mental dan ekonomi);
- c) Wajib, perkawinan hukumnya bisa menjadi wajib bagi mereka yang sudah mampu secara *dhohir* dan batin serta dikhawatirkan terjebak dalam perbuatan zina;

³² Zakiah Daradjat, *Ilmu Fiqh*, Jilid 2, (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995), 37.

³³ H. Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam Indonesia*, (Jakarta: CV. Akademika Pressind, 1995), 114.

³⁴ Sudarsono, *Hukum Kekeluargaan Nasional*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1991), 74-75.

- d) Haram, pernikahan bisa menjadi haram hukumnya bagi mereka yang berniat untuk menyakiti perempuan yang akan dinikahkan;
- e) Makruh, pernikahan bisa berubah menjadi makruh bagi mereka yang belum mampu memberi nafkah baik secara *dhohir* maupun batin.

B. Perkawinan Menurut Hukum Adat

Pengertian perkawinan menurut hukum adat adalah urusan kerabat, urusan keluarga, urusan masyarakat, urusan martabat dan urusan pribadi dan begitu pula menyangkut hubungan keagamaan. Artinya perkawinan bukan saja berarti sebagai perikatan perdata, tetapi juga sekaligus merupakan perikatan kekerabatan dan ketetanggaan. Jadi, terjadinya suatu ikatan perkawinan bukan semata-mata membawa akibat terhadap hubungan keperdataan, seperti hak dan kewajiban suami istri, harta bersama, kedudukan anak dan kewajiban orang tua, tetapi menyangkut tentang hubungan-hubungan adat-istiadat, kewarisan, kekeluargaan, dan ketetanggaan serta menyangkut upacara-upacara adat dan keagamaan. Begitu jugamenyangkut kewajiban menaati perintah dan larangan agama, baik dalam hubungan manusia dengan tuhan (ibadah) maupun hubungan manusia dengan sesama manusia (muamalah) dalam pergaulan hidup agar selamat di dunia dan selamat di akhirat.³⁵

Perkawinan adalah salah satu peristiwa yang sangat penting dalam kehidupan bermasyarakat, sebab perkawinan itu tidak hanya menyangkut wanita dan pria bakal membelai saja, tetapi

³⁵ Wirani Aisyah Anwar, *Hukum Islam dan Hukum Adat*, (Sumatera Barat: Insan Cendikia Mandiri, 2020), 58-59.

juga orang kedua belah pihak, saudara-saudaranya, bahkan keluarga-keluarga mereka masing-masing. Bahkan dalam hukum adat perkawinan itu bukan hanya merupakan peristiwa penting bagi mereka yang masih hidup saja, tetapi perkawinan juga merupakan peristiwa yang sangat berarti serta yang sepenuhnya mendapat perhatian dan diikuti oleh arwah-arwah para leluhur kedua belah pihak.³⁶ Dan dari arwah-arwah inilah kedua belah pihak beserta seluruh keluarganya mengharapkan juga restunya bagi mempelai berdua, hingga mereka ini setelah menikah selanjutnya dapat hidup rukun bahagia sebagai suami istri.

1. Sistem dan Asas-asas Perkawinan Adat

Sebenarnya istilah hukum adat ini sedikit sekali di ungkapkan oleh orang banyak, di kalangan mereka terkenal dengan sebutan adat saja. Kata adat berasal dari bahasa Arab yang berarti kebiasaan. Adat adalah mengikat dan mempunyai akibat hukum.³⁷

Sistem perkawinan yang dewasa ini banyak berlaku adalah sistem “*eleuthrogami*”, di mana seorang pria tidak lagi diharuskan atau dilarannng untuk mencari calon istri di luar atau di dalam lingkungan kerabat melainkan dalam batas-batas hubungan keturunan dekat (nasab) atau periparan (musyarah) sebagaimana ditentukan oleh hukum Islam atau hukum perundang-undangan yang berlaku.

³⁶ Wignjodipoero Soerojo, *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat*, (Jakarta: PT Gunung Agung, 1984), 22.

³⁷ Muhammad Bushar, *Asas-asaz Hukum Adat*, (Jakarta: PT Pradanya Paramita, 1994), 3.

Pihak orang tua menginginkan agar dalam mencari jodoh anak-anak mereka memperhatikan sebagaimana dikatakan oleh orang Jawa “bibit”, “bobot”, “bebet” baik dari si laki-laki maupun dari si perempuan yang bersangkutan. Apakah bibit seseorang itu berasal dari keturunan yang baik, bagaimana sifat watak perilaku dan kesehatannya, bagaimana keadaan orang tuanya. Bagaimana pula bobotnya, harta kekayaan dan kemampuan serta ilmu pengetahuannya. Dan bagaimana bobotnya, apakah si laki-laki mempunyai pekerjaan, jabatan dan martabat yang baik dan lain sebagainya.

Perkawinan menurut hukum adat tidak semata-mata berarti suatu ikatan antara seorang pria dengan wanita sebagai suami-istri untuk maksud mendapatkan keturunan dan membangun serta membina kehidupan keluarga rumah tangga, tetapi juga berarti suatu hubungan hukum yang menyangkut para anggota kerabat dari pihak istri dan dari pihak suami. Terjadinya perkawinan, berarti berlakunya ikatan kekerabatan untuk dapat saling membantu dan menunjang hubungan kekerabatan yang rukun dan damai.

Sehubungan dengan asas-asas perkawinan menurut hukum adat adalah:³⁸

- a) Perkawinan bertujuan membentuk keluarga rumah tangga dan hubungan kekerabatan yang rukun dan damai, bahagia dan kekal.

³⁸ Hadikusuma Hilam, *Hukum Perkawinan Adat*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1995), 71.

- b) Perkawinan tidak saja harus sah dilaksanakan menurut hukum agama dan atau kepercayaan, tetapi juga harus mendapat pengakuan dari para anggota kerabat.
- c) Perkawinan dapat dilakukan oleh seorang pria dengan beberapa wanita sebagai istri yang kedudukannya masing-masing ditentukan menurut hukum adat setempat.
- d) Perkawinan harus didasarkan atau persetujuan orang tua dan anggota kerabat. Masyarakat adat dapat menolak kedudukan suami atau istri yang tidak diakui masyarakat adat.
- e) Perkawinan dapat dilakukan oleh pria dan wanita yang belum cukup umur atau masih anak-anak. Begitu pula walaupun sudah cukup umur perkawinan harus berdasarkan izin orang tua/keluarga kerabat. Dan lain-lain.

2. Putusnya Perkawinan Adat

Pada dasarnya perkawinan itu dapat putus dikarenakan perceraian dan kematian.

- a) Perceraian; putusnya perkawinan disebabkan karena perceraian baik menurut hukum Islam maupun hukum adat yang merupakan perbuatan tercela. Menurut ajaran agama Islam perceraian itu merupakan perbuatan yang dibenci Allah, sebagaimana Nabi bersabda:

“Dari Abdullah bin Umar berkata, Rasulullah SAW bersabda: perkara yang paling dibenci Allah adalah menjatuhkan talak.” (HR. Ibnu Majah)

- b) Kematian; walaupun hubungan perkawinan itu senditi belum tentu putus sama sekali, dikarenakan hukum adat setempat tidak mengenal putus hubungan perkawinan.

Tegasnya perkawinan antara suami dan istri itu putus karena kematian, tetapi hubungan sebagai akibat perkawinan di antara kerabat para pihak bersangkutan tidak putus, apalagi jika perkawinan itu mempunyai keturunan.

3. Larangan Perkawinan Adat

Larangan perkawinan karena memenuhi persyaratan larangan agama yang telah masuk menjadi hukum adat, ada halangan perkawinan karena memenuhi ketentuan hukum adat, tetapi tidak bertentangan dengan hukum Islam dan perundang-undangan. Adapun larangan perkawinan menurut hukum adat adalah:

a) Karena hubungan kekerabatan

Dalam hal ini di berbagai daerah di Indonesia terdapat perbedaan-perbedaan larangan terhadap perkawinan antara wanita dan pria yang ada hubungan kekerabatan.³⁹

b) Karena perbedaan kedudukan

Di berbagai daerah masih terdapat sisa-sisa dari pengaruh perbedaan kedudukan atau martabat dalam kemasyarakatan adat, sebagai akibat dari susunan *feodalisme* desa kebangsawanan adat. Misalnya seorang pria dilarang melakukan perkawinan dengan wanita dari golongan rendah atau sebaliknya.

Tetapi di masa sekarang ini tampaknya perbedaan kedudukan kebangsawanan sudah mulai pudar, banyak sudah

³⁹ E.S. Ardianto, *Mengenal Adat Istiadat dan Hukum Adat di Indonesia*, (Surakarta: Lembaga Pengembangan Dan Percetakan, 2008) 78-79.

terjadi perkawinan antara orang yang bermartabat rendah dengan orang yang bermartabat tinggi dan juga sebaliknya.

4. Macam-macam dan Bentuk Perkawinan Adat

a) Macam-macam Perkawinan Adat

Banyak macam perkawinan adat yang ada di masyarakat, yang mana satu dengan yang lain mempunyai arti sendiri sesuai dengan adat masing-masing daerahnya. Perkawinan tersebut adalah:

- 1) Kawin Lari Bersama, adalah perkawinan dimana kedua calon pengantin sudah saling menyetujui, tetapi karena menghindari kewajiban-kewajiban adat yang pada umumnya mahal, maka mereka sepakat untuk lari bersama menuju ke rumah penghulu masyarakat (kepada adat) minta dinikahkan.
- 2) Kawin Bawa Lari, adalah membawa lari seorang wanita yang sudah dipertunangkan, atau bahkan sudah menikah dengan pria lain secara paksa dengan maksud untuk dinikahnya.
- 3) Kawin Ngarangwulu atau ganti istri, adalah tungkat, sarorot, yaitu perkawinan seorang duda yang ditinggal mati istrinya dengan saudara almarhum istrinya (bisa adik atau kakak istri yang meninggal)
- 4) Kawin Ganti Tukar, atau ganti suami, medum ranjang, nyemalang pareakhon, yaitu perkawinan seorang janda yang ditinggal mati suami dengan saudara almarhum suami.

- 5) Kawin Nyalindung, adalah perkawinan seorang pria miskin dengan wanita kaya. Sebaliknya adalah perkawinan manggih kaya adalah perkawinan seorang pria kaya dengan wanita yang miskin.
- 6) Kawin Tegak-tegi adalah antara kemenakan pria dengan wanita anak perempuannya.
- 7) Kawin Ambil Anak adalah perkawinan antar anak di luar marga yang sudah diadopsi dengan anak perempuannya. Lawan dari kawin ambil anak adalah kawin semenda ngangkit.
- 8) Kawin Jeng Mirul adalah perkawinan dimana suami pindah ke kerabat istri, tetapi posisi dan warisan itu hanya diterimakan selaku pengurus/administrator untuk kepentingan istri dan anak laki-lakinya.
- 9) Kawin Manginjam Jago adalah perkawinan dimana suami tidak pindah ke dalam kerabat istrinya, ia hanya ditoleransikan sebagai penyumbang keturunan saja.
- 10) Kawin Tumbelan atau kawin darurat adalah perkawinan antara seorang perempuan yang sudah hamil tanpa suami dengan pria yang mau menikahnya, dengan tujuan agar anak yang lahir nantinya tidak disebut anak haram.⁴⁰

b) Bentuk Perkawinan Adat

- 1) Endogami adalah suatu perkawinan antara etnis, klan, suku, kekerabatan dalam lingkungan yang sama.

⁴⁰ E.S. Ardianto, *Mengenal Adat Istiadat dan Hukum Adat di Indonesia*, (Surakarta: Lembaga Pengembangan Dan Percetakan, 2008) 78-79.

- 2) Eksogami adalah suatu perkawinan antara etnis, klan, suku, kekerabatan dalam lingkungan yang berbeda.

Sedangkan Eksogami dapat dibagikan menjadi dua macam, yakni:

- (1) Eksogami Connobium Asymetris, terjadi bila dua atau lebih lingkungan bertindak sebagai pemberi atau penerima gadis seperti pada perkawinan suku batak dan ambon.
- (2) Eksogami Connobium Symetris, apabila pada dua atau lebih lingkungan saling tukar-menukar jodoh bagi para pemuda.

Eksogami melingkupi heterogami dan homogami. Heterogami adalah perkawinan antar kelas sosial yang berbeda seperti misalnya anak bangsawan menikah dengan anak petani. Homogami adalah perkawinan antara kelas golongan sosial yang sama seperti contoh pada anak saudagar/pedagang yang kawin dengan anak saudagar/pedagang.⁴¹

C. Pengertian *'urf*

Secara etimologi *'urf* berasal dari kata *'arafa, ya'rifu* sering diartikan dengan *al-ma'ruf* dengan arti “sesuatu yang dikenal”, atau berarti yang baik. Kalau dikatakan (Si Fulan lebih dari yang lain dari segi *'urf*-nya), maksudnya bahwa si fulan lebih dikenal

⁴¹<http://my.opera.com/id-as/blog/20011/01/11/macam-jenis-bentuk-perkawinan-pernikahan> (Diakses: 15 Maret 2021)

dibandingkan dengan yang lain. Pengertian “dikenal” ini lebih dekat kepada pengertian “diakui” oleh orang lain.⁴²

Sedangkan secara terminology kata *‘urf*, mengandung makna sesuatu yang telah terbiasa (di kalangan) manusia atau sebagian mereka dalam hal muamalat (hubungan kepentingan) dan telah melihat/tetap dalam diri-diri mereka dalam beberapa hal secara terus-menerus yang diterima oleh akal yang sehat. *‘urf* lahir dari hasil pemikiran dan pengalaman manusia.⁴³

Kata *‘urf* dalam pengertian terminologi sama dengan istilah *al-‘adah* (kebiasaan), yaitu:

*“Sesuatu yang telah mantap di dalam jiwa dari segi dapatnya diterima oleh akal yang sehat dan watak yang benar.”*⁴⁴

Kata *al-‘Adah* disebut demikian karena ia dilakukan secara berulang-ulang, sehingga menjadi kebiasaan masyarakat. Ulama’ Wahbah al-Zuhayli berpendapat bahwa *‘urf* mengandung makna: apa yang menjadi kebiasaan manusia dan mereka ikuti dari setiap perbuatan yang umum diantara mereka, atau lafaz yang mereka kenal secara umum atas makna khusus bukan dalam pengertian etimologi, dan ketika mendengar kata itu, mereka tidak memahaminya dengan pengertian lain.⁴⁵

Sedangkan Abdul Karim Zaidah mendefinisikan *‘urf* sebagai sesuatu yang tidak asing lagi bagi suatu masyarakat karena telah

⁴² Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, Jilid 2, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014), 387.

⁴³ A. Basiq Djalil, *Ilmu Ushul Fiqh 1 & 2*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), 162.

⁴⁴ Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Amzah, 2014), 209.

⁴⁵ Wahbah al-Zuhaili, *Ushul al-Fiqh al-Islami*, (Damaskus: Dar al-Fikr, 1986), 829.

menjadi kebiasaan dan menyatu dengan kehidupan mereka baik berupa perbuatan atau perkataan.⁴⁶ Menurut Abdul Wahhab Khallaf, '*urf*' adalah segala apa yang dikenal oleh manusia dan berlaku padanya baik berupa perkataan, perbuatan ataupun meninggalkan sesuatu.⁴⁷ Para ulama' ushul fiqh mendefinisikan '*urf*' sebagai, suatu yang telah saling kenal oleh manusia dan mereka menjadikannya sebagai tradisi, baik berupa perkataan, perbuatan ataupun sikap meninggalkan sesuatu, dimana '*urf*' juga disebut sebagai adat istiadat.⁴⁸ Dari penjelasan di atas, dapat dipahami bahwa '*urf*' terdiri dari dua bentuk yaitu, '*urf al-qauli*' (kebiasaan dalam bentuk perkataan), misalnya kalimat "engkau saya kembalikan kepada orang tuamu" dalam masyarakat Islam Indonesia mengandung arti talak. Sedangkan '*urf al-fi'li*' (kebiasaan dalam bentuk perbuatan) seperti transaksi jual-beli barang kebutuhan sehari-hari di pasar, tanpa mengucapkan lafal ijab dan qabul yang disebut jual-beli *muathah*.⁴⁹

Dari beberapa definisi di atas, dapat disimpulkan pengertian '*urf*' adalah apa yang dikenal oleh masyarakat baik berupa perkataan, perbuatan atau aturan-aturan yang telah menjadi kebiasaan bagi masyarakat tersebut. Sehingga tidak menimbulkan penafsiran lain yang berbeda kalangan masyarakat mengenai tradisi tersebut. Para ulama ushul fiqh membedakan adat dan '*urf*' sebagai salah satu dalil untuk menetapkan hukum syara'. Menurut mereka '*urf*' adalah kebiasaan mayoritas kaum, baik dalam

⁴⁶ Satria Effendi dan M. Zein, *Ushul fiqh*, (Jakarta: kencana, 2005), 117.

⁴⁷ Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Semarang: Toha Putra Group, 1994), 123.

⁴⁸ Abdul Waid, *Kumpulan Kaidah Ushul Fiqh*, (Jogjakarta: IRCiSoD, 2014), 152.

⁴⁹ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, Jilid 2..., 391

perkataan maupun perbuatan. Sedangkan adat didefinisikan dengan sesuatu yang dilakukan berulang kali tanpa adanya hubungan rasional.⁵⁰

1. Landasan Hukum *'urf*

Landasan syariah berupa Al-Qur'an, Hadis serta kaidah fiqh yang berkaitan dengan masalah akan di uraikan secara terperinci, jumhur ulama dalam menetapkan masalah dapat dijadikan *hujjah* dalam menetapkan hukum berdasarkan:

a. Al-Qur'an

Firman Allah SWT dalam surat Al-maidah (5) ayat 6 yakni:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى
الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ ۚ وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا
فَاطْهَرُوا ۚ وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ
لَمَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ
وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ ۚ مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ
وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

“Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu berdiri hendak melaksanakan salat, maka basuhlah wajahmu dan tanganmu sampai ke siku serta usaplah kepalamu dan (basuh) kedua kakimu sampai kedua mata kaki. Jika kamu dalam keadaan junub, mandilah. Jika kamu

⁵⁰ Abdul Waid, *Kumpulan Kaidah Ushul Fiqh*, (Jogjakarta:IRCiSoD, 2014), 151.

sakit, dalam perjalanan, kembali dari tempat buang air (kakus), atau menyentuh perempuan, lalu tidak memperoleh air, bertayamumlah dengan debu yang baik (suci); usaplah wajahmu dan tanganmu dengan (debu) itu. Allah tidak ingin menjadikan bagimu sedikit pun kesulitan, tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmat-Nya bagimu agar kamu bersyukur.” (Q.S. Al-maidah [5] ayat 6)

Pada ayat di atas menegaskan bahwa Allah tidak ingin menyulitkan hambanya baik di dalam syarak maupun yang lainnya. Allah akan melapangkan kesempitan dan mengurangi kesusahan kerana Allah swt maha kaya dan maha penyayang. Allah tidak memerintahkan hambanya untuk mengerjakan sesuatu kecuali di dalamnya terdapat kebaikan dan di dalamnya terdapat unsur kemanfaatan bagi hambanya.⁵¹

b. Hadist

Adapun dalil Sunnah sebagai landasan hukum *‘urf* yakni hadis dari Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan dari Ibnu Mas’ud:

مَا رَأَاهُ الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا، فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ هَسَنٌ، وَمَا رَأَاهُ الْمُسْلِمُونَ
نَسِيئًا، فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ سَيِّئٌ

⁵¹ Ahmad Mustafa al- Maraghi, *Tafsir al-Maraghi*, Juz 6, (Mesir: Mustafa al-Babi al-Halabi, 1946), 64-65.

“Apa yang dipandang oleh orang-orang Islam baik, maka baik pula disisi Allah swt., dan apa yang dianggap orang-orang Islam buruk maka buruk pulalah di sisi Allah swt.” (HR. Ahmad)⁵²

Ungkapan Abdullah bin Mas’ud di atas, baik dari segi redaksi ataupun maksudnya menunjukkan bahwa kebiasaan-kebiasaan baik yang berlaku di dalam masyarakat muslim yang sejalan dengan tuntutan umum syariat Islam adalah merupakan sesuatu yang baik di sisi Allah.

Sebaliknya hal-hal yang bertentangan dengan kebiasaan yang dinilai baik oleh masyarakat akan melahirkan kesulitan dan kesempitan dalam kehidupan sehari-hari.⁵³

2. Klasifikasi *‘urf*

Dikalangan ulama ushul fiqh, *‘urf* terbagi menjadi tiga macam, diantaranya:

a. Berdasarkan objeknya, *‘urf* terbagi menjadi dua, diantaranya:

- 1) *‘urf qauli*, yaitu kebiasaan masyarakat dalam penggunaa kata-kata atau ucapan.⁵⁴ Jadi, makna ungkapan itulah yang dipahami dan terlintas di dalam pikiran mayoritas masyarakat.

⁵² Suhartini, “Analisis ‘Urf Terhadap Tradisi Hutang-Piutang Jasa (Irutan) Di Dusun Wonosari Desa Jogodalu Kecamatan Benjeng Kabupaten Gresik”. (Skripsi UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2015).27.

⁵³ Ahmad bin Muhammad bin Hambal bin Hilal bin Asad bin Idris, *Musnad Ahmad Bin Hambal*, Jilid V (Beirut: Dar al-Kutub, 2000), 323.

⁵⁴ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, Jilid 2, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014), 387.

- 2) *'urf fi'li* ialah kebiasaan masyarakat yang berakitan dengan perbuatan.⁵⁵ Sedangkan yang dimaksud dengan perbuatan biasa disini ialah perbuatan masyarakat dalam masalah kehidupan mereka yang tidak terkait dengan kepentingan orang lain.
- b. Berdasarkan cakupannya, *'urf* terbagi menjadi dua, yaitu:
- 1) *'urf a'mm*, yaitu kebiasaan yang bersifat umum dan berlaku bagi sebagian besar kalangan masyarakat dalam berbagai wilayah yang luas.
 - 2) *'urf khash* ialah kebiasaan yang hanya berlaku pada masyarakat di wilayah tertentu.
- c. Berdasarkan keabsahan dari pandangan syara', *'urf* dibagi menjadi dua yaitu:
- 1) *'urf shahi'h* adalah kebiasaan di tengah masyarakat yang tidak bertentangan dengan dalil syara', tidak membatalkan yang wajib serta tidak mengubah sesuatu yang telah diharamkan menurut syara' menjadi sesuatu yang halal.
 - 2) *'urf fasid* ialah segala sesuatu yang telah menjadi kebiasaan manusia namun sesuatu tersebut bertentangan dengan syara'. Seperti menghalalkan yang haram serta membatalkan yang wajib.

3. Kedudukan *'urf*

Secara mendasar, seluruh ulama sepakat dengan kedudukan *'urf shahi'h* sebagai salah satu dalil syara'. Namun diantara

⁵⁵ Ibid

para ulama, terdapat perbedaan pendapat dari sisi intensitas penggunaannya sebagai dalil. Dalam hal ini ulama Syafi'iyah dan Hanabilah adalah yang paling sedikit menggunakan '*urf*' sebagai dalil dibandingkan ulama Hanfiyah dan Malikiyah.

Urf shahi'h harus dipelihara oleh seorang mujtahid di dalam menciptakan hukum-hukum dan oleh seorang hakim dalam memutuskan perkara. Karena apa yang telah menjadi kebiasaan dan dijalankan oleh orang banyak adalah menjadi kebutuhan dan menjadi mashlahat yang diperlukannya. Oleh karena itu, selama kebiasaan tersebut tidak berlawanan dengan syara', maka wajib diperhatikan.

Urf fasid tidak wajib diperhatikan, karena memeliharanya berarti menentang dalil syara'. Oleh karena itu, apabila seseorang telah terbiasa mengadakan perjanjian yang *fasid*, seperti perikatan yang mengandung riba atau mengandung unsur penipuan maka kebiasaan-kebiasaan tersebut tidak mempunyai pengaruh dalam menghalalkan perjanjian tersebut. Hanya saja perjanjian-perjanjian semacam itu dapat ditinjau dari segi lain untuk dibenarkan. Misalnya dari segi sangat dibutuhkan atau dari segi darurat, bukan karena sudah biasa dilakukan oleh orang banyak. Jika suatu hal tersebut termasuk kondisi darurat atau kebutuhan mereka, maka ia diperbolehkan.

DAFTAR RUJUKAN

Al-Qur'an

Buku

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974

A. Basiq Djalil, *Ilmu Ushul Fiqh 1 & 2*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010.

Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Amzah, 2014.

Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jilid 1 Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996.

Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, Semarang: Toha Putra Group, 1994.

Abdul Waid, *Kumpulan Kaidah Ushul Fiqh*, Jogjakarta: IRCiSoD, 2014..

Abdullah bin Muhammad bin Abdurrahman bin Ishaq, Terj. M. Abdul Ghoffar dan Abu Ihsan Al Atsari, *Tafsir Ibnu Katsir Jilid 6*, Jakarta: Pustaka Imam As-Syafi'i, 2007.

Abdur Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Prenada Media Grup 2003.

Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam Indonesia*, (Jakarta: Akademika, Pressindo, 1992), 114.

Abu Yahya Zakariya Al-Anshary, *Fath Al-Wahab*, Juz 2, Singapura: Sulaiman Mar'y, t.t.

Ahmad bin Muhammad bin Hambal bin Hilal bin Asad bin Idris, *Musnad Ahmad Bin Hambal*, Jilid V Beirut: Dar al-Kutub, 2000.

Ahmad Kamil dan Fuzan, *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008.

- Ahmad Mustafa al- Maraghi, *Tafsir al-Maraghi*, Juz 6, Mesir: Mustafa al-Babi al-Halabi, 1946.
- Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, Jilid 2, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014.
- Amir Mertosedono, *Tanya Jawab Pengangkatan Anak dan Masalahnya*, Semarang: Prize, 1987.
- Andi Syamsu Alam dan M.Fauzan, *Hukum Pengangkatan Anak Presfektif Islam*, Jakarta: Kencana, 2008.
- Arman AZ, *Monograf Lampung Lampau*, Bandar Lampung: Lampung Literature, 2021.
- Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metode Penelitian*, Jakarta: Bumi Aksara, 1997.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* Jakarta: Balai Pustaka. 2010.
- E.S Ardianto, *Mengenal Adat Istiadat dan Hukum Adat di Indonesia*, Surakarta: Lembaga Pengembangan Dan Percetakan, 2008.
- Fadli Khairuzzadhi, “Pengangkonan Dalam Pernikahan Beda Suku Pada Masyarakat Lampung Pepadun” (Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2015).
- Febriani, Nufian S, *Teori dan Praktis Riset Komunikasi Pemasaran Terpadu*, Jakarta: Tim Ub Press, 2018.
- Ghazali Abd. Rahman, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Kencana, 2007.
- Hadikusuma Hilam, *Hukum Perkawinan Adat*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1995.
- Hakim, Rahmat, *Hukum Perkawinan Islam*, Bandung: Pustaka setia, 2009.

- Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Adat Dengan Adat Istiadat dan Upacara Adatnya*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2003.
- Indah Putriana, “Pelaksanaan Pengangkatan (Pengangkatan Anak) Dalam Perkawinan Beda Suku Pada Masyarakat Lampung Pepadun di Desa Negeri Sakti Kabupaten Pesawaran” Tesis, Universitas Diponegoro, 2008
- Kamis dan Fauzan, *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008.
- Kamus Bahasa Indonesia Pusat bahasa Edisi keempat Jakarta : Pt Gramedia Pustaka Utama, 2011.
- Mudaris Zaini, *Adopsi: Suatu Tinjauan dan Sistem Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 1995.
- Muhammad Bushar, *Asas-asaz Hukum Adat*, Jakarta: PT Pradanya Paramita, 1994.
- Pusat Data dan Statistik Pendidikan dan Kebudayaan. Analisis Kearifan Lokal Ditinjau Dari Keragaman Budaya Tahun 2016 Jakarta: Kemdikbud RI, 2016.
- Samidjo, *Pengantar Hukum Indonesia*, Bandung: CV Armico, 1993.
- Satria Effendi dan M. Zein, *Ushul fiqih*, Jakarta: kencana, 2005.
- Shalahin, Bunyana *Kaidah Hukum Islam*, Yogyakarta: Kreasi Total Media, 2016.
- Sudarsono, *Hukum Kekeluargaan Nasional*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1991.
- Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2012.
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: Reneka Cipta, 2013.

- Surojo Wignjodipuro, *Pengantar dan Asas-asas Hukum Adat*, Jakarta: Gunung Agung, 1982.
- Surojo Wignjodipuro, *Pengantar dan Asas-asas Hukum Adat*, Jakarta: Gunung Agung, 1982.
- Susiadi AS, *Metodologi penelitian*, Bandar Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbit LP2M Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2015.
- Suyanto, Begong, *Metedologi Penelitian Sosial bagi Alternatif Pendekatan*, Surabaya: Air Langga Utama Pers, 2005.
- Syarifuddin Amir, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2007.
- Ter Haar B, *Asas-asas dan Susunan Hukum Adat*, Jakarta: Pradya Paramita, 1991.
- Tihami, Sahrani Sohari, *Fiqh Munakahat Kajian Lengkap*, Jakarta: Rajawali Pers, 2009..
- W. Gulo, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Gafindo, 2002.
- Wahab Al-Zuhaili, *Al-fiqih Al-Islami wa Adillatuh*, Cet. III, Bairut: Dār al-fikr 1989.
- Wahbah al-Zuhaili, *Ushul al-Fiqh al-Islami*, Damaskus: Dar al-Fikr, 1986..
- Wignjodipoero Soerojo, *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat*, Jakarta: PT Gunung Agung, 1984.
- Wirani Aisyah Anwar, *Hukum Islam dan Hukum Adat*, Sumatera Barat: Insan Cendikia Mandiri, 2020.
- Zakiah Daradjat, *Ilmu Fiqh*, Jilid 2, Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995.
- Zaini, Muderis, *Adopsi Suatu Tinjauan dari Tiga Sistem Hukum*, Jakarta: Akademika Presindo, 1995.

Zuhraeni, Serba-Serbi Hukum Adat, Bandar Lampung: Fakultas Syariah, 2017.

Zuriah, Nurul, *Metode Penelitian Social Dan Pendidikan Teori Dan Aplikasi*, Jakarta: Bumi Aksara, 2007.

Internet

Kamus Besar Bahasa Indonesia Online, <https://kbbi.web.id/tradisi> di akses pada tanggal 12 Januari 2021

<http://my.opera.com/id-as/blog/20011/01/11/macam-jenis-bentuk-perkawinan-pernikahan>

Skripsi

Suhartini, “Analisis ‘urf Terhadap Tradisi Hutang-Piutang Jasa (Irtan) Di Dusun Wonosari Desa Jogodalu Kecamatan Benjeng Kabupaten Gresik”. Skripsi UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2015.

Jurnal

Inten Puteri, dkk “Peranan Tokoh Adat Terhadap Pelestarian Adat Pengankonan Pada Masyarakat Lampung Pepadun” (Jurnal Kultur Demokrasi).

Wawancara

Nabahan, “Pernikahan Beda Suku Lampung Pubian”, *Wawancara*, Januari 10. 2021.

Andriyansyah Yusuf, wawancara dengan penulis, KAUR Pemerintahan, Gedong Tataan 03 Mei 2021.

Azwar Amin, “Pelaksana Adat *Seangkonan*”, *Wawancara*, Mei 03. 2021.

Bastian Fernandes, “Upaya Menjaga Eksistensi Adat *Seangkonan*”, *Wawancara*, Mei 03. 2021.

Data Pokok Desa Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran, 2020.

Data Pokok Desa Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran, 2020.

Desy Asyanti, “Pelaksana Adat *Seangkonan*”, *Wawancara*, Mei 03. 2021

Erwansyah, “Konsekuensi Tidak Melangsungkan Adat *Seangkonan*”, *Wawancara*, Mei 03. 2021.

Fatmawati, “Kegiatan Keagamaan Desa Gedong Tataan”, *Wawancara*, Mei 03. 2021.

Ibrahim, “Kegiatan Keagamaan Desa Gedong Tataan”, *Wawancara*, Mei 03. 2021.

Ibrahim, “Sejarah Adat *Seangkonan*”, *Wawancara*, Mei 03. 2021.

Juan Azri, “Penyebab Tidak Melangsungkan Adat *Seangkonan*”, *Wawancara*, Mei 03. 2021.

Mad Nur, “Sejarah Adat *Seangkonan*”, *Wawancara*, Mei 03. 2021.

Nabahan, “Syarat Mutlak Adat *Seangkonan*”, *Wawancara*, Mei 03. 2021.